



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Transparansi dan Akuntabilitas: Strategi Dalam Mencegah Fraud di PT Multi Karya Liftindo

Transparency and Accountability: Strategy in Preventing Fraud at PT Multi Karya Liftindo

Artika Ratna Sari Devi^{1*}, Nur Kummala Prahasti², Kinanti Putri Rosalina Dewi³, Rohmawati Kusumaningtias⁴, Ambar Kusumaningsih³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, artika.23157@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, nur.23034@mhs.unesa.ac.id

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, kinanti.23057@mhs.unesa.ac.id

⁴Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id

⁵Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, ambarkusumaningsih@unesa.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: artika.23157@mhs.unesa.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 07 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Transparansi, Akuntabilitas, Pencegahan Fraud, Tata Kelola Perusahaan

Keywords:

Transparency, Accountability, Fraud Prevention, Corporate Governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di PT Multi Karya Liftindo, sebuah perusahaan jasa penyewaan alat berat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen dan staf, serta studi dokumentasi laporan keuangan dan kebijakan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan belum memiliki unit audit internal formal, praktik transparansi melalui pelaporan terbuka dan komunikasi internal yang intensif telah membantu meminimalkan potensi fraud. Namun, kelemahan ditemukan pada aspek akuntabilitas, terutama terkait prosedur formal pelaporan, kurangnya dokumentasi, dan lemahnya sistem penghargaan dan sanksi. Penelitian ini merekomendasikan pembangunan sistem pelaporan formal, pembentukan unit audit internal, pemanfaatan teknologi digital, serta pelatihan anti-fraud untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi perusahaan jasa lain dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif guna mencegah risiko fraud.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of transparency and accountability in preventing fraud at PT Multi Karya Liftindo, a heavy equipment rental service company. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews with management and staff, as well as document analysis of financial reports and internal policies. The research findings show that although the company does not yet have a formal internal audit unit, transparency practices through open reporting and intensive internal communication have helped minimize potential fraud. However, weaknesses were identified in the aspect of accountability, particularly regarding formal reporting procedures, lack of documentation, and weak reward and sanction systems. This study recommends the development of formal reporting systems, the establishment of an internal audit unit, the use of digital technology, and the implementation of anti-fraud training to strengthen corporate governance. These findings are expected to serve as practical guidance for other service companies in building effective internal control systems to prevent fraud risks.

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7479

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola organisasi modern yang berperan penting dalam mencegah terjadinya fraud atau kecurangan, khususnya di lingkungan perusahaan seperti PT Multi Karya Liftindo. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus fraud yang melibatkan manipulasi data, penggelapan dana, dan penyalahgunaan wewenang semakin marak terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor swasta. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi perusahaan serta menurunkan kepercayaan stakeholder terhadap institusi (Rosidah, I., et al., 2023; Wonar et al., 2018). Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis yang ditandai dengan globalisasi, digitalisasi, dan keterkaitan antar entitas usaha, yang pada akhirnya memperbesar potensi celah pengendalian internal dan risiko kecurangan.

Fraud sendiri merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tidak sah atau merugikan pihak lain melalui penyembunyian informasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kepercayaan. Di lingkungan perusahaan, fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kecurangan laporan keuangan, penggelapan aset, hingga manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2022), sekitar 42% kasus fraud terdeteksi melalui laporan whistleblower, sementara hanya 15% terungkap melalui audit internal, menunjukkan bahwa sistem pengendalian konvensional saja tidak cukup tanpa dukungan budaya keterbukaan dan akuntabilitas yang kuat. Oleh sebab itu, upaya pencegahan fraud menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan dan integritas operasional perusahaan, sekaligus melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

Transparansi dalam konteks organisasi berarti keterbukaan informasi terkait kebijakan, pengelolaan keuangan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya perusahaan. Keterbukaan ini memungkinkan pihak internal maupun eksternal untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas perusahaan secara objektif, sehingga peluang terjadinya fraud dapat diminimalkan (Aulia, F., et al., 2023). Selain itu, transparansi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendorong komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan, yang berujung pada peningkatan kepercayaan dan kolaborasi dalam menjalankan operasional perusahaan. Akuntabilitas, di sisi lain, menuntut pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu maupun unit kerja. Praktik akuntabilitas mencakup pelaporan yang transparan, audit internal dan eksternal secara berkala, serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Dengan adanya akuntabilitas, setiap penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kasus fraud (Rahayu, F., Ekasari et al., 2021; Arsyad dan Arifin, 2025).

PT Multi Karya Liftindo, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan manufaktur, khususnya layanan penyewaan mesin alat berat, menghadapi tantangan besar dalam mengelola risiko fraud di tengah kompleksitas operasional dan persaingan bisnis yang ketat. Lingkup bisnis yang melibatkan pengelolaan aset berharga tinggi, kontrak layanan jangka panjang, serta interaksi dengan berbagai pihak eksternal seperti vendor dan pelanggan, menuntut penerapan sistem pengendalian yang andal dan berkelanjutan. Implementasi strategi transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun budaya perusahaan yang berintegritas dan bebas dari praktik kecurangan. Strategi pencegahan fraud tidak hanya terbatas pada aspek teknis seperti audit dan pengawasan, tetapi juga mencakup pembangunan budaya organisasi yang mendukung integritas dan etika kerja. Pelatihan anti-fraud, penerapan whistleblower system, sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, serta dokumentasi pekerjaan dan pelaporan periodik merupakan beberapa langkah konkret yang dapat memperkuat pengendalian internal perusahaan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti automation, aplikasi manajemen layanan, dan software akuntansi berbasis cloud turut berperan penting dalam mendorong efektivitas pencegahan fraud. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan manajemen memantau aktivitas operasional secara real-time, meningkatkan akurasi data, mempercepat pelacakan aktivitas, serta memudahkan audit internal informal tanpa harus selalu melibatkan pemeriksaan eksternal (Saputra et al., 2019). Teknologi

ini memperkecil peluang manipulasi data dan memberikan akses merata atas informasi penting bagi manajemen maupun pelanggan. Penerapan *role-based access control* (RBAC), *data analytics*, dan *automated alerts* dalam sistem informasi akuntansi juga mempercepat proses deteksi anomali dan ketidakwajaran dalam transaksi, yang menjadi bagian integral dari sistem pengendalian modern.

Urgensi penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di PT Multi Karya Liftindo terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana kedua konsep ini dapat diimplementasikan secara efektif di lingkungan perusahaan swasta. Di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks dan regulasi yang terus berkembang, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memenuhi kepatuhan (*compliance*), tetapi juga membangun nilai kepercayaan dan reputasi yang berkelanjutan. Dengan melakukan analisis terhadap praktik yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan strategi pencegahan fraud yang berkelanjutan dan aplikatif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran transparansi dan akuntabilitas sebagai strategi utama dalam mencegah fraud di PT Multi Karya Liftindo.

Melalui pendekatan studi kasus dan analisis mendalam, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang berintegritas dan terpercaya di era persaingan global saat ini. Penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi praktis dalam merancang kebijakan anti-fraud yang berbasis budaya organisasi, memperkuat sistem pengendalian berbasis teknologi, serta memperluas implementasi whistleblower system yang aman dan efektif. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya relevan bagi PT Multi Karya Liftindo, tetapi juga dapat menjadi referensi strategis bagi perusahaan jasa serupa di Indonesia dalam membangun tata kelola yang tangguh menghadapi ancaman fraud di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT Multi Karya Liftindo. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transparansi dan akuntabilitas sebagai strategi dalam mencegah fraud di perusahaan tersebut. Metode ini menekankan pada proses dan makna dari fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran kuantitatif atau statistik, sehingga sangat sesuai untuk menggali pengalaman dan persepsi para pelaku serta pemangku kepentingan di perusahaan.

Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sumber-sumber kunci di PT Multi Karya Liftindo, seperti manajemen, staf keuangan, dan auditor internal. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi naratif yang kaya mengenai praktik transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pencegahan fraud yang diterapkan. Selain itu, data pendukung juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa laporan keuangan, kebijakan internal, serta hasil audit yang relevan untuk memperkuat validitas temuan.

Proses analisis data dilakukan secara induktif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan triangulasi data untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Data wawancara yang telah direkam dan di transkrip kemudian dikodekan untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan fraud. Selanjutnya, hasil temuan dianalisis dalam konteks teori dan literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Penelitian ini juga memperhatikan prinsip keabsahan data kualitatif dengan melakukan pengecekan ulang (*member checking*) kepada narasumber untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan konteks yang sebenarnya. Selain itu, peneliti menjaga objektivitas dengan mendokumentasikan proses penelitian secara rinci dan transparan agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang bersifat dinamis dan berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial.

Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis wawancara dan analisis dokumentasi, penelitian ini mampu menggali secara detail bagaimana PT Multi Karya Liftindo menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah fraud. Pendekatan ini memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka secara bebas, sehingga menghasilkan data yang kaya dan kontekstual untuk mendukung pengembangan strategi pencegahan fraud yang efektif di perusahaan. (Rokhamah, R., et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Multi Karya Liftindo (MKL), dapat disusun tata kelola perusahaan, transparansi, dan pencegahan fraud di perusahaan tersebut. PT Multi Karya Liftindo merupakan perusahaan yang berdiri sejak 2010, dengan latar belakang dari pengalaman teknis di ATPM (agen tunggal Mitsubishi di Indonesia) yang kemudian mendirikan usaha di bidang jasa pemeliharaan alat berat dan rental. Visi dan misi perusahaan sangat terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), di mana perusahaan berupaya menjalankan bisnis secara transparan dan akuntabel, serta mengedepankan nilai-nilai loyalitas dan kejujuran dalam bekerja.

Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yang di awal tahun 2005 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance telah menerbitkan pedoman GCG. Pedoman tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Pedoman GCG Perbankan Indonesia, Pedoman untuk komite audit, dan pedoman untuk komisaris independen. Semua publikasi ini dipandang perlu untuk memberikan acuan dalam mengimplementasikan GCG. Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. GCG merupakan kriteria penilaian kualitatif untuk perusahaan dan Indonesia masih tergolong buruk dalam menerapkan prinsip GCG ini. (Harinurdin, E., & Safitri, K. A., 2022).

Struktur organisasi PT Multi Karya Liftindo terdiri dari beberapa posisi kunci, seperti direktur utama, admin, dan teknis. Pembagian tugas dan wewenang dilakukan secara jelas, dengan direktur utama yang mengawasi keseluruhan operasional, admin yang mengelola administrasi, dan teknis yang menjalankan tugas teknis. Komunikasi dan pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui grup internal yang memudahkan koordinasi dan transparansi antar anggota tim. Nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi oleh perusahaan adalah loyalitas, kejujuran, dan kerja keras tanpa banyak menghitung keuntungan pribadi. Perusahaan menekankan agar karyawan bekerja dengan sebaik-baiknya dan mempercayakan perhitungan keuntungan kepada manajemen. Hal ini menjadi dasar untuk mencegah praktik korupsi dan fraud di lingkungan kerja.

Mengenai riwayat pelaporan dugaan fraud atau korupsi, perusahaan mengakui bahwa kasus kecil seperti penyalahgunaan uang bensin pernah terjadi, namun nilainya relatif kecil dan dapat diatasi dengan sistem pencatatan yang ketat. Perusahaan tidak menoleransi praktik korupsi yang besar dan profesional, terutama pada area pembelian dan rekrutmen karyawan. Contoh kasus besar pernah terjadi pada perusahaan lain yang menjadi pelanggan MKL, di mana terdapat korupsi hingga ratusan juta rupiah yang melibatkan puluhan orang, namun di MKL sendiri belum ditemukan kasus serupa yang signifikan.

Transparansi di PT Multi Karya Liftindo dijaga dengan membuka informasi secara rutin kepada karyawan melalui grup komunikasi internal. Semua keputusan pembelian, penawaran harga, dan pengeluaran dicatat dan dibagikan secara terbuka untuk memudahkan pengawasan bersama. Hal ini menjadi upaya penting dalam menjaga keterbukaan dan akuntabilitas di perusahaan. Perusahaan juga

memiliki program pelatihan terkait etika kerja dan pencegahan fraud, meskipun pelaksanaannya masih sederhana dan lebih mengedepankan pengawasan langsung dan pembinaan nilai-nilai kejujuran. Karyawan diajarkan untuk menjaga integritas dan loyalitas, serta memahami bahwa korupsi tidak dapat ditoleransi walaupun dalam bentuk kecil sekalipun.

Transparansi dapat dipahami sebagai kebebasan dalam memperoleh informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan adanya pengawasan dengan partisipatif dari masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: (1) prosedur pelayanan; (2) persyaratan teknis dan administrasi pelayanan; (3) rincian biaya pelayanan; (4) pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab; (5) lokasi pelayanan; (6) janji pelayanan; (7) standar pelayanan dan, (8) informasi pelayanan. (Fahri, M., 2018).

Menurut narasumber, budaya transparansi dan akuntabilitas sudah mulai mengakar di perusahaan, meskipun masih terus dikembangkan. Hal ini terlihat dari sistem pencatatan yang terbuka dan komunikasi yang intens antara pimpinan dan staf. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan kewaspadaan terhadap potensi fraud yang bisa muncul kapan saja, terutama dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Perusahaan menggunakan teknologi sederhana berupa pencatatan manual dan grup komunikasi digital untuk mendeteksi potensi fraud. Meski belum menggunakan software khusus anti-fraud, sistem pencatatan yang ketat dan pengawasan bersama melalui grup internal sudah cukup efektif untuk mengontrol pengeluaran dan aktivitas keuangan. Strategi anti-fraud yang diterapkan dinilai cukup efektif karena belum ditemukan kasus fraud besar di perusahaan. Bukti efektivitasnya adalah tidak adanya masalah signifikan yang dilaporkan selama ini, serta adanya catatan yang jelas dan transparan mengenai pengeluaran operasional seperti bensin dan kebutuhan teknis.

Praktik Akuntabilitas:

Dalam lanskap bisnis yang dinamis, akuntabilitas telah menjadi pilar esensial yang mendukung integritas dan efisiensi operasional sebuah organisasi. Namun, tidak semua entitas, terutama yang masih berkembang atau beroperasi dalam skala kecil hingga menengah, memiliki sumber daya yang cukup untuk membentuk unit audit internal secara formal. Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana akuntabilitas dapat ditegakkan secara efektif tanpa keberadaan struktur audit internal yang resmi? PT Multi Karya Liftindo, perusahaan jasa yang bergerak di bidang layanan perawatan dan pemasangan lift, memberikan contoh nyata tentang bagaimana sebuah organisasi dapat menegakkan akuntabilitas meskipun belum memiliki departemen audit internal. Dalam wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di tingkat manajemen, terungkap bahwa perusahaan sangat menekankan pentingnya tanggung jawab individual dan transparansi dalam pelaporan sebagai dasar utama pengawasan. Laporan-laporan yang disusun oleh karyawan tidak hanya dijadikan sebagai formalitas administratif, tetapi diperlakukan sebagai dokumen yang harus mencerminkan keadaan aktual di lapangan. Setelah disusun, laporan tersebut diperiksa langsung oleh atasan masing-masing, menciptakan sebuah sistem verifikasi berlapis yang secara otomatis tertanam dalam struktur organisasi.

Dalam operasional hariannya, akuntabilitas di PT Multi Karya Liftindo dibangun melalui proses pelaporan yang dilakukan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan. Pelaporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan proses substantif yang bertujuan memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung dalam laporan-laporan tersebut kemudian diverifikasi secara menyeluruh oleh manajemen, yang tidak hanya mengandalkan data tertulis, tetapi juga melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Keterlibatan langsung ini memungkinkan manajemen untuk membandingkan data dalam laporan dengan kondisi riil, serta mendeteksi secara dini jika terdapat penyimpangan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bagaimana pengawasan langsung dari pimpinan dapat berperan sebagai pengganti dari fungsi audit formal yang biasanya dilakukan oleh unit khusus.

Tidak hanya itu, PT Multi Karya Liftindo juga menerapkan kebijakan sanksi administratif yang jelas bagi setiap pelanggaran terhadap prosedur dan standar operasional yang berlaku. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten dan tidak pandang bulu, menciptakan budaya kerja yang menekankan kepatuhan dan integritas. Sanksi bukan hanya dipandang sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran sekaligus pencegahan terhadap potensi penyimpangan di masa depan. Praktik-praktik tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal yang tidak formal sekalipun dapat berjalan efektif jika didukung oleh kedisiplinan, keterlibatan manajemen, serta sistem pelaporan yang transparan dan bertanggung jawab. (Wulandari dan Riharjo, 2018) menyatakan bahwa struktur pengawasan yang berbasis pada kedisiplinan pelaporan dan keterlibatan aktif seluruh elemen organisasi dapat memberikan jaminan atas tercapainya tujuan organisasi, bahkan tanpa keberadaan unit audit yang terinstitusionalisasi.

Temuan serupa dikemukakan oleh (Sakti, Rahmawati, dan Hamid, 2022), yang menyoroti pentingnya pengendalian internal dan gaya kepemimpinan yang partisipatif dalam menekan risiko terjadinya kecurangan. Menurut mereka, semakin tinggi keterlibatan pimpinan dalam proses pengawasan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan, terutama di lingkungan organisasi yang belum memiliki sistem pengendalian yang mapan. Lebih lanjut, (Aisyah, 2020) dalam kajiannya mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada skala usaha kecil dan menengah, menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dapat tetap diterapkan secara efektif meskipun melalui metode yang sederhana dan manual. Struktur organisasi yang relatif sederhana justru dapat mempermudah integrasi nilai-nilai tata kelola yang baik ke dalam proses kerja sehari-hari.

Meskipun pendekatan yang digunakan oleh PT Multi Karya Liftindo tergolong sederhana dan sangat bergantung pada mekanisme manual serta pengawasan langsung, efektivitasnya dalam menjaga integritas operasional dan keuangan perusahaan cukup dapat diandalkan. Namun, seiring dengan berkembangnya bisnis dan meningkatnya kompleksitas pekerjaan, perusahaan ini disarankan untuk mulai mempertimbangkan langkah-langkah strategis yang lebih sistematis. Transformasi menuju digitalisasi proses pelaporan, serta pembentukan unit audit internal yang proporsional dengan kebutuhan perusahaan, dapat menjadi landasan kuat dalam membangun sistem akuntabilitas yang lebih tangguh, responsif, dan berkelanjutan.

Fraud

PT Multi Karya Liftindo, sebagai entitas bisnis yang beroperasi di sektor jasa dan melayani berbagai kebutuhan pelanggan, memahami bahwa integritas dan akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pencegahan fraud menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan, mengingat risiko kecurangan dalam organisasi jasa cenderung tinggi akibat adanya keleluasaan dalam transaksi yang berbasis layanan dan keterlibatan berbagai pihak dalam rantai nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan telah merancang dan menerapkan serangkaian strategi pencegahan fraud yang dirancang secara komprehensif, berfokus pada empat pilar fundamental yang saling melengkapi, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, serta evaluasi dan tindak lanjut. Masing-masing pilar ini memiliki peran krusial dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan meminimalkan celah terjadinya fraud.

1. Pencegahan Fraud melalui Transparansi dan Akuntabilitas

Langkah awal dan paling strategis yang diambil oleh PT Multi Karya Liftindo dalam upaya mencegah fraud adalah dengan secara aktif meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi dan memperkuat penerapan praktik akuntabilitas dalam setiap lini operasional perusahaan. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dalam pelaporan keuangan, proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya perusahaan, yang memungkinkan pihak manajemen, pemegang saham, serta stakeholder lainnya untuk mengakses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG),

khususnya transparansi dan akuntabilitas, merupakan alat manajerial yang efektif dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas dan memitigasi risiko fraud sejak dini. Dengan memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan mempersempit ruang gerak potensi pelaku fraud yang memanfaatkan ketidakjelasan atau kelemahan system (Putri et al., 2024).

2. Deteksi Fraud melalui Sistem Pengawasan

Dalam rangka mendeteksi potensi fraud secara efektif dan efisien, PT Multi Karya Liftindo membangun sistem pengawasan internal yang komprehensif, mencakup pengendalian manajerial, pengendalian teknologi informasi, serta mekanisme pemantauan yang berlapis. Salah satu inisiatif penting adalah pengembangan, yaitu sarana pelaporan yang memungkinkan karyawan maupun pihak eksternal untuk menyampaikan dugaan adanya fraud tanpa rasa takut akan ancaman atau balas dendam. Sistem ini dirancang untuk menjamin anonimitas dan kerahasiaan pelapor, sehingga mendorong lebih banyak partisipasi dalam pengawasan organisasi.

3. Investigasi dan Penerapan Sanksi

Apabila terdapat indikasi atau temuan atas dugaan fraud, PT Multi Karya Liftindo memiliki prosedur investigasi yang terstruktur dan dijalankan secara objektif. Proses investigasi dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti awal yang mendukung dugaan kecurangan, dilanjutkan dengan wawancara, analisis data, dan pemeriksaan dokumen terkait guna mengungkap fakta dan pelaku yang terlibat. Investigasi dilakukan oleh tim yang independen, baik dari fungsi audit internal maupun komite pengendalian, untuk menjaga objektivitas dan mencegah konflik kepentingan. Investigasi yang dilakukan secara transparan dan profesional sangat penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas, memberikan keadilan bagi semua pihak, dan menciptakan efek jera terhadap pelaku fraud (Putri et al., 2024). Berdasarkan hasil investigasi, perusahaan menerapkan sanksi yang tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi ini bervariasi, mulai dari peringatan tertulis, penurunan jabatan, pemutusan hubungan kerja, hingga pelaporan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana. Dengan menerapkan sanksi yang konsisten dan adil, perusahaan memberikan pesan yang jelas bahwa fraud merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi dalam organisasi.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari siklus pengendalian yang berkelanjutan, PT Multi Karya Liftindo secara rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, kebijakan anti-fraud, serta mekanisme pengawasan yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan melalui audit internal, penilaian risiko, serta review kebijakan yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis, regulasi, maupun teknologi. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan atau celah yang masih ada, merumuskan perbaikan, dan memastikan bahwa strategi pencegahan fraud tetap adaptif terhadap dinamika risiko yang berkembang. Evaluasi berkala tidak hanya meningkatkan efektivitas pengendalian internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas (Ritonga, 2024).

Penguatan tata kelola perusahaan di PT Multi Karya Liftindo tidak hanya terlihat dari struktur organisasi yang jelas, tetapi juga dari penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang konsisten. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memperkuat kepercayaan stakeholder dan menurunkan risiko terjadinya fraud melalui mekanisme kontrol internal yang efektif. MKL telah mengimplementasikan pembagian tugas yang tegas dan komunikasi yang terbuka, yang menjadi pondasi utama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di lingkungan kerja. Transparansi yang dijalankan melalui grup komunikasi internal merupakan inovasi sederhana namun efektif dalam mendorong keterbukaan informasi. Transparansi dalam organisasi dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan karena meningkatkan pengawasan sosial antar anggota

tim. Di MKL, keterbukaan mengenai pengeluaran dan keputusan bisnis memungkinkan seluruh karyawan untuk turut serta dalam pengawasan, sehingga potensi fraud dapat dideteksi lebih awal dan diminimalisasi.

Secara keseluruhan, PT Multi Karya Liftindo menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai integritas dalam menjalankan bisnisnya. Sistem pengawasan dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama dalam mencegah praktik fraud dan menjaga kepercayaan karyawan serta pelanggan. Perusahaan mengakui bahwa meskipun masih ada tantangan dalam memperkuat budaya anti-fraud, pendekatan yang dilakukan dengan keterbukaan informasi dan pengawasan bersama telah membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Hal ini menjadi modal penting untuk pengembangan perusahaan ke depan.

Dengan demikian, PT Multi Karya Liftindo dapat dijadikan contoh perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance secara nyata melalui praktik transparansi, pembagian tugas yang jelas, dan sistem pengawasan yang melibatkan seluruh anggota organisasi, sekaligus berupaya mencegah fraud dengan pendekatan yang humanis dan sistematis.

Temuan 1: Transparansi dalam Proses Pelaporan Operasional dan Keuangan

Transparansi merupakan salah satu unsur paling fundamental dalam membangun sistem akuntabilitas yang kuat dan efektif. Dalam konteks PT Multi Karya Liftindo, perusahaan yang belum memiliki unit audit internal formal, transparansi berperan sebagai pengganti sekaligus penguat dalam upaya menjaga integritas dan mencegah terjadinya fraud. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen dan pengawas lapangan, diperoleh gambaran bahwa perusahaan sangat menekankan pentingnya pelaporan yang terbuka, jujur, dan dapat diverifikasi. Pelaporan tidak hanya dijadikan alat dokumentasi administratif, tetapi juga menjadi mekanisme utama dalam menilai kinerja serta deteksi dini atas ketidaksesuaian di lapangan. Manajer operasional perusahaan menyatakan bahwa setiap laporan, baik itu laporan harian, mingguan, maupun bulanan, wajib disusun secara rinci oleh teknisi dan staf administrasi. Setelah disusun, laporan tersebut diserahkan kepada atasan langsung untuk ditelaah dan diverifikasi. Proses ini mencerminkan prinsip keterbukaan dalam aliran informasi internal perusahaan. Verifikasi dilakukan tidak secara pasif, melainkan dengan membandingkan isi laporan dengan hasil inspeksi lapangan yang rutin dilakukan oleh manajemen. Dalam hal ini, tidak jarang atasan menemukan perbedaan kecil antara data di atas kertas dan kondisi aktual di lokasi kerja, yang kemudian langsung ditindaklanjuti untuk perbaikan.

Salah satu pengawas menyebutkan dalam wawancara bahwa, *“Kami tidak punya sistem audit internal seperti perusahaan besar, jadi kami harus jujur dalam menulis laporan. Kalau ada yang ditutup-tutupi, cepat atau lambat akan ketahuan saat atasan turun ke lapangan. Lebih baik terbuka dari awal.”* Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan budaya kerja yang transparan, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif di kalangan karyawan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan dan efisiensi kerja. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Rosidah dkk., 2023) yang menyatakan bahwa dalam organisasi publik maupun privat, transparansi dalam sistem pelaporan mampu memperkuat sistem pengawasan internal. Ketika informasi mengalir secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik, maka setiap pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan evaluasi dan koreksi atas kesalahan atau penyimpangan. Dalam studi mereka mengenai instansi pemerintah, transparansi dikaitkan erat dengan efektivitas pencegahan fraud melalui penguatan dokumentasi, pelibatan publik, dan keterbukaan akses informasi. Meskipun PT Multi Karya Liftindo beroperasi dalam sektor swasta, prinsip-prinsip tersebut terbukti relevan dan aplikatif dalam konteks praktik sehari-hari di perusahaan.

Lebih lanjut, sistem pelaporan yang dijalankan di PT Multi Karya Liftindo tidak berdiri sendiri. Laporan yang disusun oleh karyawan selalu diikuti dengan proses klarifikasi atau tanya jawab jika ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian. Praktik ini dilakukan secara langsung dan terbuka antara

staf pelapor dan atasan yang memverifikasi. Proses ini dinilai sangat efektif karena membangun rasa tanggung jawab langsung antara pelapor dan pihak pengawas. Dengan demikian, setiap laporan bukan hanya menjadi kumpulan data, melainkan bentuk akuntabilitas personal yang konkret. Transparansi ini juga didukung oleh kebijakan internal perusahaan yang menekankan bahwa laporan operasional adalah dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Karyawan yang terbukti memberikan informasi yang tidak benar akan dikenakan sanksi administratif, yang mencakup peringatan tertulis hingga pemutusan hubungan kerja, tergantung pada tingkat pelanggaran. Mekanisme ini mendorong para pegawai untuk lebih berhati-hati dan jujur dalam menyusun laporan, serta menanamkan kesadaran bahwa setiap informasi yang disampaikan adalah bentuk representasi dari kejujuran pribadi dan profesionalisme kerja.

Melalui kombinasi antara pelaporan terbuka, verifikasi berjenjang, dan inspeksi langsung, PT Multi Karya Liftindo berhasil membangun sistem transparansi internal yang cukup solid, meskipun masih sederhana dan bersifat manual. Dalam keterbatasannya, perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, jujur, dan responsif terhadap kesalahan, sehingga secara tidak langsung telah menekan potensi fraud dari akar masalahnya. Hal ini menjadi bukti bahwa transparansi bukan semata-mata soal teknologi atau sistem digital, tetapi lebih pada komitmen bersama dalam menjaga integritas proses dan keterbukaan antar lini organisasi. Temuan ini membuktikan bahwa dalam ketiadaan unit audit internal formal, transparansi yang dibangun melalui komunikasi langsung, verifikasi manual, dan budaya pelaporan yang jujur mampu menjadi benteng awal dalam mencegah praktik-praktik yang berisiko merugikan perusahaan. Sejalan dengan (Rosidah dkk., 2023), keterbukaan informasi dan proses pertanggungjawaban yang menyeluruh merupakan strategi kunci dalam pencegahan fraud, terutama di organisasi dengan struktur pengawasan yang masih berkembang.

Temuan 2: Lemahnya Akuntabilitas dalam Sistem Pertanggungjawaban Internal Meningkatkan Potensi Fraud

Selain transparansi yang menjadi temuan awal dalam penelitian ini, aspek akuntabilitas juga memainkan peran sentral dalam menjaga integritas organisasi, khususnya dalam mencegah terjadinya fraud. Di PT Multi Karya Liftindo, hasil wawancara dengan sejumlah pegawai dan manajemen menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas masih lemah, baik dari sisi administratif maupun dari sisi moral. Kelemahan ini menciptakan celah struktural yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, seperti penggelapan dana, manipulasi data operasional, hingga penggunaan anggaran tanpa prosedur pelaporan yang jelas.

Salah satu isu yang paling menonjol adalah tidak adanya prosedur formal dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ atas kegiatan operasional dan keuangan. Dalam banyak kasus, laporan hanya disusun secara informal dan disampaikan secara lisan jika diminta oleh atasan. Tidak semua kegiatan memiliki dokumentasi tertulis yang sistematis dan bisa dilacak secara historis. Beberapa bukti penggunaan dana hanya berupa nota informal atau kuitansi tanpa ada proses verifikasi silang oleh bagian keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaporan tidak dianggap sebagai kewajiban yang melekat pada setiap aktivitas organisasi, melainkan sekadar formalitas jika diminta. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip akuntabilitas yang mengharuskan adanya dokumentasi dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lemahnya penerapan standar pelaporan dalam organisasi jasa menjadi penyebab utama meningkatnya risiko fraud, karena tidak adanya mekanisme kontrol yang melekat pada aktivitas administratif dan keuangan (Reza Zaki Mubarak, dkk, 2021).

Selain aspek administratif, akuntabilitas moral juga menjadi persoalan krusial. Peneliti menemukan bahwa tidak semua pegawai memiliki kesadaran etis yang tinggi dalam menjalankan tugas, terutama ketika tidak ada pengawasan langsung. Budaya tanggung jawab personal terhadap hasil kerja dan integritas laporan belum terbentuk dengan kuat. Salah seorang pegawai menyatakan bahwa selama tidak ada yang mengecek langsung ke lapangan, penyusunan laporan bisa dilakukan dengan longgar

dan kadang menyesuaikan kondisi di atas kertas dengan yang diharapkan atasan. Hal ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas dalam bentuk komitmen etis terhadap pekerjaan belum menjadi nilai yang tertanam dalam kultur organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Yulianus Bramero Kurniawan Rugu, Muslichah, 2022), yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman terhadap etika kerja dan lemahnya sistem sanksi internal menjadi penyebab utama lemahnya akuntabilitas moral di banyak organisasi sektor jasa.

Ketidakhadiran unit audit internal yang independen semakin memperburuk situasi ini. PT Multi Karya Liftindo tidak memiliki struktur audit yang mampu melakukan evaluasi risiko, mengawasi pelaksanaan kegiatan, serta memastikan bahwa setiap aktivitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selama ini, pengawasan hanya dilakukan oleh atasan langsung melalui inspeksi berkala, namun sifatnya masih informal dan tergantung pada inisiatif pribadi, bukan sistematis. Dalam konteks ini, kontrol manajerial yang bersifat informal tidak cukup untuk mencegah penyimpangan yang bersifat sistemik atau berulang.

Selain itu, belum adanya sistem penghargaan dan sanksi yang jelas terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban juga turut melemahkan akuntabilitas dalam organisasi. Pegawai yang lalai atau melakukan pelanggaran terhadap pelaporan tidak selalu mendapatkan sanksi, sementara mereka yang bekerja dengan baik tidak selalu mendapatkan apresiasi. Akibatnya, tidak ada insentif yang kuat untuk menjaga integritas dan kinerja pelaporan. Sistem reward and punishment yang konsisten dan adil merupakan salah satu cara efektif untuk membentuk budaya akuntabilitas yang kuat di sektor swasta.

Berangkat dari berbagai temuan ini, peneliti menyarankan agar PT Multi Karya Liftindo segera membangun sistem akuntabilitas yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Ini mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk laporan pertanggungjawaban, pembentukan unit audit internal, penyusunan kode etik yang ditegakkan secara konsisten, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang mendukung etos kerja yang bertanggung jawab. Dengan membangun sistem akuntabilitas yang mencakup aspek administratif dan moral, perusahaan tidak hanya dapat mencegah potensi fraud, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas tinggi. Dalam jangka panjang, penguatan akuntabilitas ini akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis, reputasi perusahaan, dan kepercayaan pelanggan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memainkan peran krusial dalam upaya pencegahan fraud di PT Multi Karya Liftindo. Melalui penerapan sistem pelaporan yang terbuka, komunikasi yang intensif antara manajemen dan karyawan, serta pengawasan langsung oleh atasan, perusahaan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang relatif aman dari praktik kecurangan yang signifikan, meskipun belum memiliki unit audit internal formal. Transparansi dibangun melalui pencatatan manual yang terbuka dan verifikasi berlapis, yang memungkinkan deteksi dini atas potensi penyimpangan dalam operasional sehari-hari. Budaya loyalitas dan kejujuran yang ditanamkan di perusahaan turut memperkuat pengawasan sosial antar anggota tim.

Namun demikian, sistem akuntabilitas yang ada masih menunjukkan kelemahan, terutama dalam hal dokumentasi pertanggungjawaban yang belum terstruktur secara formal, lemahnya standar pelaporan administratif, serta belum tertanamnya kesadaran etis yang kuat di kalangan pegawai. Ketidadaan prosedur pertanggungjawaban yang sistematis dan unit pengawasan formal berpotensi membuka celah bagi terjadinya fraud, terutama dalam pengelolaan dana dan aktivitas operasional yang belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, meskipun PT Multi Karya Liftindo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip good corporate governance melalui transparansi dan pengawasan langsung, penguatan akuntabilitas yang lebih sistematis tetap menjadi kebutuhan mendesak agar pencegahan fraud dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah saran penting yang dapat diimplementasikan oleh PT Multi Karya Liftindo untuk memperkuat upaya pencegahan fraud di lingkungan kerjanya. Pertama, perusahaan disarankan untuk membangun sistem pelaporan formal melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, sehingga setiap laporan pertanggungjawaban memiliki format, waktu penyusunan, dan alur verifikasi yang terstruktur. Selain itu, pembentukan unit audit internal menjadi langkah strategis berikutnya. Kehadiran tim audit internal, meskipun kecil, akan berperan penting dalam memantau risiko, melakukan evaluasi kegiatan operasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara berkesinambungan.

Selanjutnya, penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten juga sangat diperlukan. Dengan memberikan apresiasi kepada pegawai berintegritas dan sanksi tegas kepada pelanggar, perusahaan dapat memperkuat budaya akuntabilitas yang selama ini masih bergantung pada pengawasan informal. Pemanfaatan teknologi digital pun menjadi saran krusial untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pelaporan. Dengan menggunakan aplikasi sederhana, perusahaan dapat mempercepat proses pelaporan, mengurangi risiko kesalahan manual, serta memperkuat pengawasan berbasis data.

Terakhir, penting bagi perusahaan untuk mengadakan pelatihan rutin terkait etika kerja dan anti-fraud bagi seluruh pegawai. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang risiko kecurangan, tetapi juga membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, sehat, dan profesional. Dengan menerapkan saran-saran ini, PT Multi Karya Liftindo diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta menjadi contoh bagi perusahaan jasa lain dalam menghadapi tantangan fraud di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kurniawan Saputra, Komang, Putu Dian Pradnyanitasari, and Ni I Made Intan Prihandani dan Gst B Ngr P Putra. 2019. "Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 10(2): 168–76. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>.
- Arsyad, Rahmatika M, and Johan Arifin. 2025. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Tindak Korupsi Di Inspektorat DKI Jakarta." 7: 112–19.
- Aulia, Firda, Sofyan Syamsuddin, and Sahrir Sahrir. 2023. "Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Owner* 7(3): 2112–20. doi:10.33395/owner.v7i3.1462.
- Bramero Kurniawan Rugu, Yulianus, and Stie Malangkecewara. 2021. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Mencegah Accounting Fraud Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi dan Pajak*: 891–904. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- Evita, Flora, and Dian Fitria Handayani. 2024. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 6(1): 29–43. doi:10.24036/jea.v6i1.1107.
- Mubarak, R Z, T Rahmawati, and ... 2021. "Pengaruh Pengawasan Internal Dan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes." *Journal of Accounting ...* 2(01): 45–55. <http://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/603%0Ahttp://jurnal.umus.ac.id/index.php/>

jacfin/article/download/603/384.

- Rachmawati, Anisa i. 2020. "Analisis Implementasi Good Corporate Governance." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 5(2): 17–30. doi:10.22146/abis.v5i2.59292.
- Rahayu, Fransiska, Luh Dian Ekasari, and Ahmad Mukoffi. 2021. "Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi." *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8(2): 129–34. doi:10.31294/moneter.v8i2.11034.
- Rosidah, Idah, Gunardi, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka. 2023. "Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA* 2(1): 137–56. doi:10.59820/emba.v2i1.110.
- Sakti, Fitra Rahmat, Rahmawati Rahmawati, and Rahmad Solling Hamid. 2022. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)." *Owner* 6(3): 3077–84. doi:10.33395/owner.v6i3.932.
- Utama, Daniel Aditya, Riana Sitawati, and Subchan Subchan. 2023. "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 18(2): 109. doi:10.21460/jrak.2022.182.423.
- Wulandari, Retno, and Ikhsan Budi Riharjo. 2018. "Village Financial Management Accountability and Village Internal Control System." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(7). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1007/1025>.